

## BAB II

### POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.<sup>36</sup> Politik luar negeri juga terkait erat dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

#### A. Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan pencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

---

<sup>36</sup>Pengertian Politik Luar Negeri. <http://www.ideelok.com/politik/politik-luar-negeri-bebas-aktif-republik-indonesia>

Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." Jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>37</sup> Alinea tersebut mengandung arti adanya kewajiban bangsa Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional, agar secara aktif menentang terjadinya segala bentuk kekerasan yang berwujud pada ketidakadilan sosial. Bangsa Indonesia juga berkewajiban untuk ikut berjuang menyusun ketertiban dunia dan memelihara perdamaian, demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.<sup>38</sup>

Dalam UUD 45, juga terdapat ketentuan-ketentuan batang tubuh UUD 45 yang merupakan landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

Pasal 11: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain."

---

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup> Djumadi M. Anwar, *Diktat mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia*, UMY, hal. 41

Pasal 13: (1) Presiden mengangkat duta konsul; (2) Presiden menerima duta Negara lain.

Selain landasan konstitusional, Indonesia juga memiliki landasan idiil yang berupa Pancasila. Pancasila merupakan landasan idiil politik luar negeri, terutama sila ke dua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini jelas menyangkut aspek kehidupan seluruh umat manusia yang mencita-citakan terwujudnya perikemansusiaan yang adil dan beradab.<sup>39</sup> Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara merupakan jawaban bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Pancasila sebagai dasar Negara mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan politik Negara agar selalu sesuai dan berlandaskan Pancasila. Atas dasar itu pula Pancasila merupakan dasar obyektif yang berpengaruh dan menjiwai politik luar negeri RI.

Indonesia adalah Negara merdeka dan berdaulat senantiasa berperinsip pada anti kolonialisme, bebas aktif dan selalu mendukung upaya pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan atas pancasila dan UUD 45 sebagai implementasi hasrat dan cita-cita bangsa. Politik Luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasionalnya yaitu memelihara dan melindungi kehidupan bangsa serta kelangsungan pembangunan dan segala bidang demi tercapainya kesejahteraan bangsa. Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 juga merupakan kepentingan nasional yang hendak dicapai Bangsa Indonesia.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 38

Globalisasi yang sedang berjalan membuat sebuah perubahan yang cepat dalam system internasional. Perubahan ini akan membuat Indonesia tidak luput dari masalah-masalah yang berkaitan dengan *low politics* seperti HAM, demokratisasi, *good governance*, teorisme dan lingkungan hidup. Dalam menghadapi perubahan tersebut Indonesia berupaya secara aktif memanfaatkan setiap peluang dan mengatasi setiap tantangan dengan tidak meninggalkan perinsip-perinsip dasar politik luar negeri Indonesia dengan perkembangan dinamis atas interpretasi terhadap perinsip dasar kerangka konseptual pembangunan Indonesia.

#### **B. Sejarah politik Luar Negeri Indonesia**

Politik luar negeri Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraan selama kurun waktu yang panjang. Pada tahun-tahun pertama berdirinya, negara Indonesia menghadapi persoalan yang penting, antara lain usaha konsolidasi bagi kelangsungan hidup negara. Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia datang dari pihak Belanda yang ingin kembali menjajah negara Indonesia. Ancaman ini, menyebabkan pemerintah Indonesia merumuskan politik luar negerinya Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesia mengumumkan pendirian politik luar negerinya dihadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi : “..... tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro – Rusia atau pro –Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-citanya.

Ada perbedaan pandangan antara pengamat mengenai awal politik luar negeri Indonesia. Sebagian pengamat berpendapat bahwa awal politik luar negeri Indonesia bermula ketika pernyataan kedaulatan negara oleh Belanda pada Desember 1949.<sup>40</sup> Sebelum itu Indonesia bukan sebuah Negara karena Belanda tidak memberikan kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, sebelum tahun 1949-1950, Indonesia tidak memiliki politik luar negeri. Kalangan nasionalis Indonesia berpendapat bahwa Indonesia telah menjadi Negara berdaulat ketika kemerdekaan diproklamasikan. Negara dipandang sebagai sebuah pemerintahan yang merdeka (republik), mempunyai batas-batas wilayah yang jelas (wilayah Hindia Belanda, walaupun sebelum Desember 1949 tidak dikuasai sepenuhnya) dan populasi (masyarakat yang mendiami Hindia Belanda).<sup>41</sup>

Meskipun pada awalnya Indonesia terbatas pada wilayah yang kecil dan tidak diketahui oleh Negara-negara besar, namun kedaulatan Indonesia sudah diakui oleh Uni Soviet pada 1948, dan Negara-negara di kawasan Timur Tengah pada 18 November 1946.<sup>42</sup> Jadi walaupun kedaulatan Indonesia secara penuh diberikan pada tahun 1949 tetapi mengingat Indonesia sudah

---

<sup>40</sup> Belanda memberikan kemerdekaan politik pada Indonesia setelah menandatangani Perjanjian Meja Bundar pada awal Desember 1949 di Den Haag, Belanda.

<sup>41</sup> Leo Suryadinata, "Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soegarto", LP3S, Jakarta, 1998, hal 29

<sup>42</sup> Dalam hal ini Mesir telah memberikan pengakuannya sejak tanggal 23 Maret 1946, ketika Pemerintah Mesir bersikap tegas pada Belanda yang menolak status perwalian warga Indonesia yang ada di negaranya. Sejak saat itulah warga Indonesia di Mesir tidak lagi berhubungan dengan kedaulatan Belanda. Pemerintah Mesir hanya akan berhubungan dengan Panitia. Lihat, Bantarto Bandoro, "Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru", CSIS, Jakarta 1994, hal. 220

menjadi sebuah Negara, maka politik luar negeri Indonesia sudah dimulai sejak saat itu.<sup>43</sup>

Periode awal politik luar negeri Indonesia disebut sebagai periode revolusi yaitu pada era 1945-1949 (sebelumnya pengakuan kedaulatan). Pada periode awal ini Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi untuk memantapkan kemerdekaan dari Belanda. Perundingan-perundingan dengan Belanda banyak menghiasi politik luar negeri Indonesia pada era ini. Perjanjian Linggar jati (November 1946) dan Perjanjian Renville (1948) adalah upaya diplomasi pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda. Selain itu peristiwa penting yang terjadi pada era ini adalah ketika Hatta berpidato di depan kelompok kerja KNIP pada 2 September 1948 yang kemudian isi pidato Hatta tersebut menjadi prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang "bebas aktif".

Pada periode ini banyak keberhasilan yang dicapai dalam diplomasi Indonesia. Perundingan-perundingan yang terjadi antara Indonesia – Belanda adalah salah satu keberhasilan yang telah tercapai. Walaupun dalam perundingan tersebut banyak yang merugikan pihak Indonesia tetapi dengan berhasilnya mengajak Belanda duduk dalam satu meja itu berarti secara *de jure* Belanda telah mengakui Indonesia. Keberhasilan Indonesia juga dilihat dari Negara-negara Timur Tengah yang mengakui kedaulatan Indonesia melalui Haji Agus Salim. Selain itu pengakuan kedaulatan dari Uni Soviet

---

<sup>43</sup> Ibid. hal 78

mealalui Suripno juga merupakan satu keberhasilan sebuah diplomasi Indonesia dalam rangkaian politik luar negeri Indonesia.

Setelah era ini berakhir dengan dicapainya persetujuan KMB, maka dimulailah era baru di mana Indonesia mencari format yang tepat untuk politik luar negerinya. Ketika sistem pemerintahan berubah menjadi demookrasi parlementer maka bentuk politik luar negeri Indonesia juga disesuaikan dengan kebijakan kabinet yang sedang berkuasa. Salah satu contoh adalah ketika Indonesia di bawah kabinet Hatta (tidak memihak salah satu blok) sehingga saai itu politik bebas aktif merupakan kebijakan pemerintah Indonesia.

Pada era inilah Indonesia mulai menjadi salah satu kekuatan baru dunia di luar Negara-negara Barat dalam percaturan politik internasional. Hal tersebut ditandai dengan sebuah momen prestisius yang berupa keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. KAA ini menghasilkan sebuah rancangan yang dikenal dengan namsa "*Dasa Sila Bandung*" (*Bandung Principlea*) yang menegaskan non intervensi terhadap masalah-masalah domestic dari masing-masing Negara dan meningkatkan solidaritas masyarakat Asia-Afrika.<sup>44</sup>

Periode selanjutnya adalah periode dipimpin Soekarno, PKI dan Militer menjadi actor politik yang utama. Pada periode ini politik luar negeri Indonesia cenderung lebih bersifat militan, anti colonial dan anti Barat. Secara

---

<sup>44</sup> Leo Suryadinata, *Op.cit.*, hal. 38

tidak resmi politik luar negeri Indonesia lebih condong ke Negara-negara komunis dan sosialis. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh sikap *decision maker* pada saat itu terutama ketika Presiden Soekarno yang sangat anti kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya di Hari Nasional tahun 1959, yang dikenal dengan manipol atau *Manifesto Politik*, Soekarno mengidentifikasi kekuatan kolonialis dan imperialis sebagai musuh utama Indonesia, dan Soekarno menyatakan bahwa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Barat harus terus dilanjutkan.

Politik luar negeri Indonesia yang militant terlihat dengan perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda serta langkah politik luar negeri Soekarno yang membagi dunia menjadi dua kutub yaitu Nefos (*New Emerging forces*), kelompok Negara-negara komunis dengan Negara-negara baru di Asia Afrika dan Oldefos (*Old Established Forces*), kelompok Negara-negara Barat. Soekarno secara implisit menempatkan Indonesia sebagai tokoh dari kekuatan-kekuatan yang baru muncul tersebut.<sup>45</sup> Selain itu konfrontasi dengan Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PBB juga merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia pada masa itu.

Ketika Soekarno mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, maka dimulailah Orde Baru di bawah Soeharto. Tidak seperti Soekarno, pemerintah Soeharto lebih menaruh perhatian kepada masalah pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu hubungan dengan Negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat mulai dijalin terutama dengan Amerika Serikat. Pemerintahan baru

---

<sup>45</sup> Ibid hal 49.



tersebut memperkenalkan kebijakan pintu terbuka di aman investasi asing ditingkatkan dan bantuan pinjaman dibutuhkan untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia dihentikan dan menaruh khusus terhadap soal regionalism. Indonesia secara aktif mendukung. Pendirian ASEAN di tahun 1967 untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik.<sup>46</sup>

Kedekatan dengan Barat terutama Amerika Serikat tidak diimbangi dengan jalinan hubungan dengan Negara-negara komunis. Setelah G30S/PKI seolah-olah pemerintah Indonesia trauma berhubungan Negara-negara komunis, bahkan hubungan Indonesia dengan RRC sempat sampai pada titik di mana hubungan diplomatic pada akhirnya beku di tahun 1967. Pada awal pemerintahan, Soeharto sebenarnya tidak tertarik dengan politik luar negeri. Hal itu terlihat dari intensitas kunjungan luar negeri, tetapi hal itu berubah ketika awal tahun 1980 an, di aman Soeharto secara aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah internasional. Peringatan 30 tahun KAA. Ketua GNB dan pertemuan APEC merupakan agenda internasional Soeharto saat itu selain ASEAN.

### **C. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif**

Sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Hal ini memang tidak tercantum dala UUD 45. Pernyataan politik luar negeri Indonesia ini pada awalnya merupakan pernyataan sikap bangsa Indonesia yang

---

<sup>46</sup> Untuk suatu pembicaraan mengenai kepentingan Indonesia dalam pembentukan ASEAN, lihat Adam Malik, *In the Service of Republic.* ", (Jakarta : Gunung Agung, 1980), hal. 273

disampaikan lewat pidatonya Drs. Mohammad Hatta di depan badan kerja KNIP pada tanggal 2 September 1948. Pidato ini sebenarnya untuk menyikapi dinamika politik internasional yang berkembang. Pada saat itu Indonesia sebagai Negara baru sangat membutuhkan pengakuan kedaulatan dari Negara lain. Uni Soviet kemudian datang dengan dukungannya dengan sebuah perjanjian yang menghendaki Indonesia dan Uni Soviet saling bertukar perwakilan. Walaupun sangat membutuhkan dukungan dari Negara besar seperti Uni Soviet tetapi Hatta sebagai perdana menteri sadar akan adanya perang dingin, tidak ingin menciptakan kesan bahwa Indonesia berdampingan dengan Uni Soviet.

Pidato Hatta di depan badan kerja KNIP tersebut kemudian isinya dikenal sebagai awal politik luar negeri yang bebas akti. Dalam pidatonya Hatta menyampaikan:

“apakah Indonesia yang berjuang bagi kemerdekaannya harus memilih antara posisi pro-Soviet data pro-Amerika?dapatkah kita memilih posisi lain dalam mencapai tujuan kita? Pemerintah berpandangan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi “obyek” dalam perjuangan politik internasional. Sebaliknya harus menjadi “subyek” yang memiliki hak dalam menentukan pilihannya sendiri, yakni untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya, namun kemerdekaan ini harus diperoleh melalui rasa kepercayaan diri”. Hatta menambahkan lagi bahwa politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan dengan situasi dan kenyataan yang kita hadapi. Politik

Indonesia tidak dapat ditentukan oleh politik Negara lain yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan Negara tersebut.<sup>47</sup>

Pengertian bebas aktif mempunyai makna ketegasan bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri.<sup>48</sup> Dalam hal ini bebas berarti tidak memihak salah satu blok, sedangkan aktif berarti Indonesia secara aktif ikut serta dalam pergaulan internasional. Politik bebas aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional bukan politik netral. Politik bebas aktif tidak mengikat diri kepada salah satu blok dunia dan ditujukan untuk menghapus ekspansionisme. Politik ini juga merupakan upaya untuk menghindarkan diri dari segala bentuk intervensi yang dapat membahayakan kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu Negara dan menimbulkan ketegangan dunia.<sup>49</sup>

#### **D. Lembaga-lembaga Pembuat Politik Luar Negeri Indonesia**

Pada perinsipnya ada beberapa lembaga yang berfungsi sebagai perumus politik luar negeri Indonesia, yaitu:

##### ***1.1. Eksekutif***

Peran eksekutif dalam hal ini presiden sangatlah vital dalam pembuatan politik luar negeri Indonesia. Dalam sejarah politik luar negeri Indonesia, seorang presiden mampu berperan sebagai *decision maker* yang

---

<sup>47</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hal. 32-33. Lihat Mohammad Hatta, "Mendayung antara Dua Karang", Jakarta, Kementrian Penerangan, Februari 1951, hal 12-13

<sup>48</sup> *Politik Luar Negeri RI*, Badan Penelitian dan Pengembangan Deplu RI, 1987, hal. 21

<sup>49</sup> Djumadi M. Anwar, *op. cit.*, hal. 47-48

kuat. Pada era orde lama, Soekarno sebagai seorang eksekutif mampu mengarahkan politik luar negeri Indonesia sesuai dengan keinginan dan kebijakannya yang anti Barat. Tidak jauh berbeda dengan Soeharto. Pimpinan Orde baru ini juga mampu menjadi komando utama dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri sebenarnya telah diatur bahwa kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintah RI berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>50</sup> Hal inilah yang mendasari bahwa eksekutif merupakan actor utama dalam politik luar negeri.

### ***2.1. Kementrian Luar Negeri***

Perlu diuraikan di sini mengenai gambaran umum Kementrian Luar Negeri (Kemlu) atau Departemen Luar Negeri (Deplu). Sejak awal Kemlu didominasi oleh para diplomat karier sipil, dan peranannya berubah dari waktu ke waktu. Sebelum masa demokrasi terpimpin, Kemlu memainkan peranan yang menentukan dalam pembuatan politik luar negeri. Tetapi peran tersebut merosot ketika system pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin dan semakin merosot selama orde baru. Ketika reformasi

---

<sup>50</sup> UU RI No. 37 tahun 1999 tentang, "Hubungan Luar Negeri", Bab II pasal 6

berlangsung peran Kemlu dalam hubungan internasional kembali menguat. Pemerintah memberikan kewenangan yang cukup luas bagi Kemlu.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mengurus masalah luar negeri, Kemlu merupakan ujung tombak reformasi. Kemlu harus mampu mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat dalam tatanan politik luar negeri. Selain itu Kemlu harus mampu menjadi penghubung antara Indonesia dengan Negara lain.

### **3.1 Komisi I DPR**

Komisi I (dikenal sebagai Komisi Luar Negeri dan Pertahanan) dalam DPR secara formal bertanggung jawab pada masalah-masalah luar negeri dan pertahanan. Anggota dari komisi ini merupakan perwakilan dari partai politik yang ada di DPR. Pada era Orde Baru masukan mereka ke dalam perumusan kebijakan politik luar negeri tampak terbatas. Kuatnya Soeharto dan militerlah yang membuat fungsi Komisi I DPR tidak berjalan.

Komisi I mulai diperhitungkan sejalan dengan era reformasi. Sebagai legislative seluruh kebijakan luar negeri yang akan dikelarkan oleh pemerintah harus dibahas terlebih dahulu di Komisi I. salah satu contoh adalah ketika mengambil kebijakan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon maka pemerintah terlebih dahulu berkonsultasi ke DPR. UU no. 37 benar-benar diterapkan dalam system pembuatan kebijakan luar negeri.

## **E. Hubungan Bilateral Indonesia – Suriah**

### **1.2. Politik**

Hubungan politik Indonesia – Suriah telah dimulai sejak pengakuan *de jure* Suriah terhadap Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 1947. Suriah termasuk negara yang mempunyai jasa bagi kemerdekaan Indonesia pada transisi era kolonial Belanda. Suriah mempunyai andil besar dalam memperjuangkan Indonesia agar menjadi negara yang merdeka secara penuh. Suriah adalah wakil tetap di PBB yang menghendaki agar masalah Indonesia dibawa pada forum DK PBB yang akhirnya berhasil mengeluarkan resolusi dalam bentuk instruksi agar segera dihentikan agresi militer Belanda dan harus dicapai penyelesaian damai melalui perundingan. Hubungan diplomatik kedua negara antara Indonesia dan Suriah dimulai tahun 1950. Indonesia menempatkan seorang Kuasa Usaha di Damascus tahun 1955. Pada saat Suriah bergabung dengan Mesir dalam ” Republik Persatuan Arab tahun 1959, Perwakilan RI di Damascus dirubah menjadi Konsulat jenderal dan ketika RPA pecah tahun 1961, konsulat jenderal di Damaskus kembali menjadi KBRI.

Historisitas tersebut merupakan landasan kuat bagi hubungan bilateral Indonesia-Suriah. Suriah pun merupakan salah satu Negara Arab yang pertama memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Terhitung terjalinnya hubungan kedua negara itu sampai pada tahun 2012 telah menginjak usia yang ke - 65 tahun. Hubungan RI-Suriah baik pada tataran regional maupun internasional, terjalin erat melalui berbagai forum kerjasama

internasional, seperti melalui forum OKI, GNB dan PBB. Di mana kedua negara mengupayakan untuk saling memberikan dukungan bagi pencalonan masing-masing pada keanggotaan badan internasional. Suriah selalu memberikan dukungan atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Dewan HAM, ICAO, IMO, dan External Auditor WHO.<sup>51</sup>

Antara kedua negara terdapat "memorandum Saling pengertian mengenai pembentukan Konsultasi Bilateral" yang ditandatangani di Jakarta tanggal 27 Juni 1997, guna mengkaji kembali seluruh aspek yang ada di dalam hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, perdagangan, teknik, kebudayaan dan untuk melakukan pertukaran pandangan mengenai masalah-masalah internasional yang menjadi kepentingan bersama serta interaksi di area internasional.

Hubungan antara kedua negara juga berkembang baik tercermin dari saling meminta/memberi dukungan dalam pencalonan untuk menduduki posisi/jabatan pada organisasi-organisasi internasional. Di samping itu, hal ini juga didorong oleh peranan menonjol Suriah di PBB dan berbagai organisasi internasional atau regional lainnya, seperti dalam GNB, OKI dan Liga Arab. Dalam menyikapi masalah internasional seperti Irak, Suriah dalam kerangka Liga Arab mempunyai pandangan yang sama dengan Indonesia. Hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Suriah diharapkan dapat berlangsung semakin erat. Di samping itu, Indonesia dan Suriah mempunyai kesamaan sikap dalam isu-isu mengenai Timur Tengah pada PBB.

---

<sup>51</sup> ibid

## 2.2. Bidang Ekonomi-Perdagangan

Kedekatan secara politis kedua Negara itu, membantu memberikan ruang gerak dan iklim yang kondusif bagi pengembangan kerjasama ekonomi RI-Suriah. Hubungan bilateral kedua negara ini semakin erat sejak tahun 2007 di mana Menlu RI melakukan kunjungan ke Suriah. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani dua kesepakatan bidang ekonomi kedua negara antara lain Agreement on Economic, Scientific, and technical cooperation dan memorandum of Understanding on the establishment of a Joint Commission for the economic, Scientific, technical, and Cultural Cooperation.

Di sektor perdagangan, hubungan kedua Negara mencatat perkembangan berarti. Nilai kerja sama ekonomi Indonesia-Suriah periode 1990-2010 yang mencapai US\$ 335 juta dinilai masih minim. Menurut data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Suriah pada 2009 baru mencapai 91,5 juta dolar AS sementara pada Januari-Juli 2010 senilai 40,8 juta dolar AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan negara itu selalu surplus sejak 2005 sampai semester pertama 2010. Neraca perdagangan dengan Suriah pada 2009 surplus 88,5 juta dolar AS dan selama Januari-Juli 2010 surplus 31,2 juta dolar AS. Tahun 2009 nilai total perdagangan sebesar 91 juta dolar AS, ekspor kita 90 juta dolar AS dan impor dari sana cuma satu juta dolar AS saja.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> [Http://www.Kemlu.com.hubungan bilateral Indonesia-suriah.html](http://www.Kemlu.com.hubungan%20bilateral%20Indonesia-suriah.html). diakses 24 April 2012.



Indonesia merupakan negara yang berpeluang besar dalam mengeksport berbagai komoditasnya ke Suriah atau pun negara-negara Timur Tengah, produk Indonesia yang kompetitif selama ini telah mampu menjangkau dan memasuki pasar Suriah antara lain produk kertas, komponen kendaraan (ban dan velg kendaraan), barang elektronik dan peralatan listrik, mie instan, serta produk kayu, tekstil, kelapa sawit. Sejumlah produk andalan Indonesia penting lainnya kini juga mulai memasuki pasar Suriah, antara lain produk bahan bangunan, peralatan rumah tangga serta produk-produk *home furniture*. Sementara ekspor Suriah ke Indonesia terdiri atas fosfat, minyak zaitun, kapas dan buah-buahan.

Di tahun 2010, pengusaha Indonesia dan Suriah telah sepakat meningkatkan kerjasama bisnis dan investasi pada berbagai sektor usaha. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Ketua Kadin Indonesia Komite Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam Fachry Thaib, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Suriah di Jakarta Bassam Alkhatib, dan Ketua Syrian-Indonesian Business Council Mohammed Brinjikji Aiman, di Jakarta. Banyak peluang kerja sama bisnis dan investasi antara kedua negara yang bisa dikembangkan. Menurut Suryo, kerja sama kedua negara saat ini masih rendah. Banyak informasi yang bisa di gali dari sini karena kedua negara punya banyak peluang yang bisa dikembangkan. Indonesia masih berpeluang besar mengeksport berbagai komoditas seperti tekstil, kelapa sawit, produk kayu, dan elektronik ke Suriah dan negara-negara Timur Tengah di sekitarnya.

Para pengusaha asal Suriah datang ke Indonesia antara lain untuk melihat potensi produk yang bisa diimpor pada pameran dagang yang diselenggarakan 13-17 Oktober 2010 di Jakarta. "Mereka mau impor karena tahu barang kita cukup kompetitif, dibanding China misalnya," katanya. Pengusaha Suriah juga menjajaki peluang kerja sama investasi dengan pelaku usaha di Indonesia. Kuasa Usaha Kedutaan Besar Suriah di Jakarta Bassam Alkhatib mengatakan negaranya menawarkan regulasi investasi yang sederhana dan mudah bagi investor Indonesia yang hendak menanamkan modal di negaranya. Sementara ketua Syrian-Indonesian Business Council mengatakan pengusaha Indonesia bisa menghemat biaya produksi dan distribusi serta waktu pengiriman barang ke negara-negara Timur Tengah bila membuka basis produksi di negara itu. "Apalagi kita juga punya perjanjian perdagangan bebas dengan Turki dan Iran, itu akan memudahkan pemasaran produk di Iran dan Turki. Syria bisa menjadi gerbang masuk ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa," kata Aiman. Meski tak ada hambatan dan tantangan berarti namun intensitas kerja sama perdagangan Indonesia-Suriah masih rendah.<sup>53</sup>

Nilai total perdagangan Indonesia dengan negara itu walau cenderung meningkat sejak 2005, namun jumlahnya tergolong masih kecil. Menurut data

---

<sup>53</sup><http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/internasional/10/10/13/139654-indonesia-suriah-sepakat-tingkatkan-kerja-samaekonomi>

Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Suriah pada 2009 baru mencapai 91,5 juta dolar AS sementara pada Januari-Juli 2010 senilai 40,8 juta dolar AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan negara itu selalu surplus sejak 2005 sampai semester pertama 2010. Neraca perdagangan dengan Suriah pada 2009 surplus 88,5 juta dolar AS dan selama Januari-Juli 2010 surplus 31,2 juta dolar AS. "Ekspor kita masih jauh lebih besar dari impor. Tahun 2009 nilai total perdagangan sebesar 91 juta dolar AS, ekspor kita 90 juta dolar AS dan impor dari sana cuma satu juta dolar AS saja.

Di tahun 2011 pemerintah Indonesia meningkatkan neraca perdagangan dengan Suriah. Suriah menyampaikan beberapa ketertarikannya di berbagai sektor perdagangan dengan Indonesia. Salah satunya adalah minatnya untuk membeli beberapa helikopter produksi PT Dirgantara Indonesia. Selain di bidang perdagangan, Pemerintah suriah juga menyampaikan keinginannya berkerjasama dengan Indonesia di bidang pendidikan. Dengan cara melakukan pertukaran pelajar antar kedua negara. Suriah juga ingin bekerjasama dengan ITB untuk kerjasama pendidikan.

Kedua negara memiliki potensi untuk melakukan perdagangan bilateral dalam skala yang jauh lebih besar dari saat ini. Pemerintah Indonesia telah berdiskusi dengan delegasi Suriah terkait pengalaman mengelola BUMN, transfer cash management dan pembiayaan usaha kecil dan mikro. Kedua negara juga telah menunjuk sebuah kelompok kerja sebagai platform kerjasama bagi Indonesia untuk memasuki pasar Suriah.

Kerjasama bisnis di antara kedua negara setidaknya sudah terjalin pada tiga proyek pada tahun 2010. Indofood akan mengekspor produk ke Suriah, juga ada kerjasama di bidang perminyakan dan pengolahan air. Kata Al-Dardari, potensi untuk mengembangkan kerjasama sangat terbuka. Jika ada perjanjian perdagangan bebas, Indonesia akan mudah memasarkan produk ke Iran dan Turki. Sementara itu, investasi Suriah di Indonesia pada periode 1990-2010 mencapai US\$335 ribu terutama di industri migas. Sebaliknya Indonesia juga berinvestasi pada berbagai bidang bisnis termasuk industri bahan makanan, pengelolaan air bersih dan eksplorasi minyak di Syria.<sup>54</sup>

Bagi Suriah Indonesia adalah negara yang sangat penting. Apalagi saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN. Suriah menempatkan Indonesia sebagai pusat perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Utusan Suriah untuk Indonesia, Al-Dardari, berharap bahwa kunjungan yang terjalin di antara kedua negara tidak hanya meliputi Government to Government, melainkan meliputi pula hubungan antar warga dan antar dunia usaha. Suriah, adalah pintu gerbang yang strategis bagi barang-barang Indonesia karena negeri itu sudah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara Timur Tengah, Turki, dan Iran. Timur tengah merupakan pasar yang besar, dengan total penduduk lebih dari 400 juta jiwa, Maka Pemerintah Suriah kini mengusulkan menjalin kerjasama perdagangan yang lebih erat, semacam

---

<sup>54</sup> <http://www.businessreview.co.id/kebijakan-bisnis-ekonomi-1510.html>

preferential free trade agreement dengan Indonesia. Sebaliknya, Suriah juga ingin menggunakan Indonesia sebagai titik penghubung dengan kawasan ASEAN yang juga sudah menjadi satu pasar bebas.

### **3.2 Bidang Infrastruktur**

Selain kerjasama ekonomi, pemerintah Suriah telah menawarkan hak istimewa kepada Indonesia untuk ambil bagian dalam sejumlah proyek infrastruktur bernilai USD 18 miliar untuk periode 2010-2015. Pemerintah Suriah meminta Indonesia untuk menjadi kontraktor pembangunan proyek infrastruktur di negara Suriah senilai US\$ 18 miliar itu. Proyek tersebut berupa pembangunan 500 *tower building*, Suriah ingin dalam 5 tahun membelanjakan US\$ 18 miliar (Rp 157 triliun rupiah) di negerinya, dan yang menarik adalah dan apabila Indonesia berminat akan tunjuk langsung, tidak perlu tender.

Sementara dari pihak Indonesia (Menko Hatta Rajasa dan Kementerian BUMN) tidak menyia-nyiakan kesempatan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan kesiapannya terkait penawaran investasi 500 tower building Pemerintah Syria pada Indonesia tanpa perlu melalui tahapan tender. Terutama Adhi Karya. Pembangunan Perumahan (PP) siap diajak bermitra untuk membangun apartemen, tower-tower di daerah Syria. Nilai investasi kedua negara pada tahun 2008 adalah sebesar US\$ 100,21 juta namun nilai investasi ini terus menurun di dua tahun terakhir, pada tahun 2009 tercatat nilai investasi Suriah menurun hingga US\$ 91,57 juta dan tahun 2010 jatuh

di angka US\$ 75,97 juta.<sup>55</sup> Suriah juga sedang mengupayakan untuk menjadi *conviniient point* di kawasan dan diharapkan dapat terbentuk stabilitas kerjasama regional. Infrastruktur akan dibangun untuk mendukung upaya ini antara lain pipa gas antar negara (Iran-Irak-Mesir) sepanjang 800 km dan jalan tol. Untuk itu, Suriah mengharapkan dapat mendapat masukan dari Indonesia yang dianggap sudah mempunyai pengaiaman.

#### 4.2 TKI

Di Suriah, pada tahun 2012 berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, total TKI di Suriah mencapai 11.760 orang. Dari jumlah ini, sebagian besar berprofesi sebagai pembantu rumah tangga sebanyak 11.500 orang, bekerja di sektor informal/penatalaksana rumah tangga. sementara sekitar 201 orang menjadi pekerja di perusahaan berbadan hukum. Tentu keberadaan TKW/TKI dalam jumlah cukup besar di Suriah itu, menjadi sumber devisa cukup besar pula bagi pemerintah dan negara Indonesia. Mereka mendapat gaji per bulan rata-rata 100 dollar AS. Bisa dikalkulasikan devisa yang diraup dari TKW/TKI di Suriah itu, dengan asumsi 100 dollar AS x 50.000. Penempatan TKW ke Suriah mulai marak sejak tahun 2001, ketika pemerintah Suriah secara resmi mengizinkan tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor informal, yang diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 234/ON. Meskipun demikian, keputusan tersebut hanya mengatur mengenai izin masuk

---

<sup>55</sup> <http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4543&l=id> diakses 3 Juli 2012

tenaga kerja asing sektor informal ke Suriah dan tata cara pengurusan izin tinggal mereka, tanpa secara eksplisit menyebutkan mekanisme penempatan tenaga kerja asing itu sendiri.

Meskipun Depnakertrans RI pada saat ini belum menjadikan Suriah sebagai Negara tujuan penempatan TKI ke luar negeri, banyak PPTKI ilegal yang menempatkan TKI ke Suriah melalui berbagai cara, termasuk mengatur rute pemberangkatan mereka agar tidak diketahui oleh aparat berwenang di Indonesia. Sejalan dengan melonjaknya jumlah TKI di Suriah, maka berbagai permasalahan yang harus ditangani KBRI Damaskus juga semakin meningkat. Bentuk permasalahan tersebut, juga semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya masalah yang timbul hanya menyangkut soal gaji atau TKW yang tidak betah, lalu kini berkembang menjadi kasus-kasus yang lebih rumit seperti sakit fisik, sakit mental, kecelakaan, bunuh diri, pencurian, tindak asusila dan kematian.<sup>56</sup>

### **5.3 Bidang Pendidikan**

Pengiriman pelajar/mahasiswa Indonesia ke Suriah juga mengalami peningkatan. Melalui kerangka kerjasama sosial budaya yang dimulai sejak tahun 1988, Departemen Agama RI mendapatkan jatah sebanyak 15 beasiswa untuk pelatihan Imam dan Khatib pada lembaga pendidikan Islam Mujamma'at; Sheikh Ahmad Kaftaro selama tiga bulan. Pada tahun 2002, lembaga tersebut tidak menerima mahasiswa asing, tetapi pada tahun-tahun terakhir ini kembali menerima mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

---

<sup>56</sup> <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231.html?start=20> di akses 27 Juni 2012

Hingga tahun 2010, ada sekitar 80 pelajar Indonesia di lembaga tersebut. Pada tahun 2007, tercatat 12 mahasiswa Indonesia diterima diberbagai perguruan tinggi agama di Suriah, sehingga saat ini terdapat 139 pelajar/mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Suriah, antara lain di universitas Kaftaro, Ma'had Sheikh Badaruddin, universitas Fatah al Islami, Universitas Damascus, Lembaga Bahasa Arab Ma'had Fatah, universitas Azad Islami, universitas cabang Al Azhar, Ma'had al Tahzieb dan Ma'had Mambej di Aleppo. Di tahun 2010, Indonesia telah memberikan beasiswa bagi para pelajar Suriah yang akan belajar Ilmu Agama Islam di berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Sedangkan Suriah akan memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang Lembaga

57 Pendidikan Islam untuk Ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/388621/> diakses pada 29 Juni 2012.